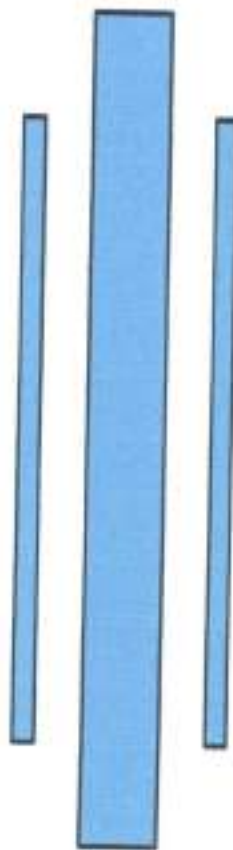




**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEC. KLIRONG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klirong Tahun 2025** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen perubahan Renja ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan, baik karena adanya perubahan kebijakan, kondisi keuangan daerah, maupun karena perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk ditangani secara cepat dan tepat. Proses perubahan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap mempertahankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

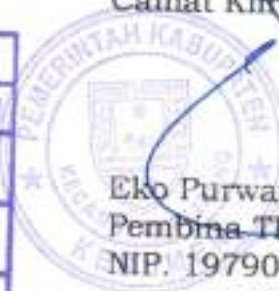
Perubahan Renja Kecamatan Klirong Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah kecamatan tetap relevan, efisien, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat sasaran. Dalam penyusunannya, telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Besar harapan kami, dokumen perubahan Renja ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Klirong selama tahun 2025.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kecamatan Klirong.

Kebumen, 26 Juni 2025
Camat Klirong

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyaningrum	
Sahyo P	



Eko Purwanto, S.STP., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 197901161998101001



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A.1. Pengertian Renja

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

A.2. Proses Penyusunan Renja

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja

- ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
- ✓ Orientasi mengenai Renja
- ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
- ✓ Penyiapan Data dan Informasi

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

- ✓ Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD

- ✓ Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review oleh Tim RKPD
- ✓ Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
- ✓ Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEKO untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Klirong tahun 2021-2026, sehingga target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Klirong tahun 2021-2026.

Dokumen Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 dengan Dokumen Renstra Kecamatan Klirong tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Klirong disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Klirong tahun 2025 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2025 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Klirong tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan

Klirong tahun 2025 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Klirong tahun 2025 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Klirong tahun sebelumnya (2024).

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Klirong disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang:

- A. Latar belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi), mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD
- B. Landasan hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD
- C. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- D. Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang :

- A. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) dan capaian renstra Perangkat Daerah memuat kajian/ review terhadap Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu/ 2023, Perkiraan capaian tahun berjalan/ 2024, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Dearah tahun-tahun sebelumnya.
- B. Analisis kinerja pelayanan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah.
- C. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah , mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, dan formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan/ penetapan RKPD.
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Klirong).

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang :

- A. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa.
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah.
- C. Program Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 serta perkiraan maju 2026 perangkat daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

Bab V : Penutup.

Berisi uraian tentang :

- 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
- 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN KLIRONG TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Klirong saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Klirong tahun lalu, yaitu tahun 2023 harus dievaluasi sebagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, Kecamatan Klirong mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah yakni misi kesatu " Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi" Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Klirong pada tahun 2021 menjalankan 4 Program dan 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Berikut akan ditampilkan rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Klirong:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Klirong

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KLIRONG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	55 Dok	19 Dok	9 dok	9 dok	100	9 dok	37 dok	67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	31 Dok	11 Dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	21 dok	68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	20 Dok	8 Dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	16 dok	80
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas pengelolaan administrasi keuangan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	3 Paket	6 Paket	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Penyelenggaraan Rapat-rapat dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
		dalam daerah									
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	12 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0	4 Paket	4 Paket	33	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeler Kantor	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	0 paket	0 paket	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	2 paket	2 paket	50	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana kantor	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	2 paket	2 paket	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	67
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	67
	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	194 Unit	70 Unit	37 Unit	37 Unit	100	37 Unit	144 Unit	74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah								
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah Unit pemeliharaan kendaraan dinas	66 Unit	20 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	40 Unit	61
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit pemeliharaan mebel Kantor	40 Unit	12 Unit	8 Unit	8 Unit	100	15 Unit	20 Unit	88
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan kerja	56 unit	20 unit	12 unit	12 unit	100	20 unit	32 unit	93
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100	1 Unit	7 Unit	58
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	89	84,50	86,00	86.96	101,2	87,00	87,00	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Non Perizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	5 Jenis	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan	Jumlah Jenis Pelayanan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian dan Pindah Datang)	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	5 Jenis	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0	4 jenis	4 Jenis	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan	12	4 kegiatan	2 kegiatan	2	100	2	8 kegiatan	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan			kegiatan		kegiatan		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Jadi Kab. Kebumen dan HUT RI	12 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	8 kegiatan	67
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	66,6%	25,00 %	25,00%	25,00%	100	37,50 %	37,50 %	56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Keg	14 Keg	8 Keg	8 Keg	100	8 Keg	22 Keg	65
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	144 desa	48 desa	24 desa	24 desa	100	24 desa	96 desa	67
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	24 desa	12 desa	2 desa	2 desa	0	2 desa	2 desa	8
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 desa	6 desa	4 desa	4 desa	100	4 desa	14 desa	58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terfailitasinya Program Pembangunan	144 desa	48 desa	24 desa	24 desa	100	24 desa	96 desa	67	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan Ketertiban Umum	6 Kcg	2 Kcg	1 Kcg	1 Kcg	100	1 Kcg	4 Kcg	67	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terselenggaranya musrenbangcam dan Musrenbangdes	12 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	3 kegiatan	9 kegiatan	75	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	24 Kcg	8 Kcg	4 Kcg	4 Kcg	100	2 Kcg	14 Kcg	58	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Masyarakat (Pembinaan PKK, UKS, BUMDes dan Sosmas)								
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes dan Bansos Sembako)	12 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	8 kegiatan	67

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat capaian realisasi Target Renstra menunjukkan tingkat capaian rata-rata sudah mencapai 67% sedangkan untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih 50%. Untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun ketiga Renstra berjalan sudah mencapai 87,00 dari target akhir 89,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Klirong dijelaskan bahwa Kecamatan Klirong mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupafen serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
2. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Klirong diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Klirong:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong tahun 2023
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Klirong			86,00	87,00	88,50	89,00	86,96	89,66	89,00	89,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan			kegiatan		kegiatan		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Jadi Kab. Kebumen dan HUT RI	12 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	8 kegiatan	67
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	66,6%	25,00 %	25,00%	25,00%	100	37,50 %	37,50 %	56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Keg	14 Keg	8 Keg	8 Keg	100	8 Keg	22 Keg	65
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	144 desa	48 desa	24 desa	24 desa	100	24 desa	96 desa	67
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	24 desa	12 desa	2 desa	2 desa	0	2 desa	2 desa	8
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 desa	6 desa	4 desa	4 desa	100	4 desa	14 desa	58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terfailitasinya Program Pembangunan	144 desa	48 desa	24 desa	24 desa	100	24 desa	96 desa	67
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan Ketertiban Umum	6 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	4 Keg	67
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terselenggaranya musrenbangcam dan Musrenbangdes	12 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	3 kegiatan	9 kegiatan	75
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	24 Keg	8 Keg	4 Keg	4 Keg	100	2 Keg	14 Keg	58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
		Masyarakat (Pembinaan PKK, UKS, BUMDes dan Sosmas)								
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes dan Bansos Sembako)	12 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	8 kegiatan	67

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat capaian realisasi Target Renstra menunjukkan tingkat capaian rata-rata sudah mencapai 67% sedangkan untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih 50%. Untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun ketiga Renstra berjalan sudah mencapai 87,00 dari target akhir 89,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Klirong dijelaskan bahwa Kecamatan Klirong mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
2. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Klirong diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Klirong:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong tahun 2023
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Klirong			86,00	87,00	88,50	89,00	86,96	89,66	89,00	89,50	

Tabel 2.3 di atas menunjukkan kinerja pelayanan dan tingkat capaian nilai pada survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Klirong. Pada tahun 2023 menunjukkan prosentase capaian pelayanan masyarakat realisasinya mencapai 101%. Untuk capaian nilai survey kepuasan masyarakat masih Tahun 2024 proyeksi capaian nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu 87,00 yang pada Semester 1 Tahun 2024 sudah tercapai 89,66. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan tahun 2025 dan 2026 target 88,50 dan 89,00 dengan proyeksi juga 89,00 dan 89,50.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Klirong

Tujuan dari perumusan permasalahan dan isu strategis daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori

1. Permasalahan dan Hambatan

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Klirong sampai dengan Tahun 2024 telah dilaksanakan sudah mencapai target sebesar 89,66%, yaitu dengan melebihi prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Untuk tahun berjalan, yaitu tahun 2024, ada beberapa hambatan untuk bisa memenuhi target yang ditetapkan di renstra 2021-2026. Berikut beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Klirong yaitu:

- a. Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa Pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi.
- b. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
- c. Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi, masukan dari hasil evaluasi belum di gunakan sebagai bahan perbaikan di OPD;

- d. Data kemiskinan yang masih belum lengkap sehingga penanganan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh desa maupun dinas terkait, terkadang tidak tepat sasaran;
- e. Desa masih kesulitan dalam penyusunan, pelaksanaan maupun evaluasi APBDes.
- f. Kecamatan Klirong mempunyai jumlah warga sekitar 66.611 (Kecamatan Klirong Dalam Angka Tahun 2023) membutuhkan layanan kependudukan yang cepat dan professional. Akan tetapi Operator SIAK di Pelayanan PATEN Kecamatan Klirong hanya ada 2 orang sehingga kadang dalam pelayanan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu akses jaringan internet juga sering mengalami kendala. Selain itu, warga dari Kecamatan sekitarnya misal Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring juga banyak yang melakukan layanan administrasi kependudukan semisal cetak KTP elektronik dan cetak Kartu Anak Indonesia di Kantor Kecamatan Klirong yang sudah ada fasilitas tersebut sementara di Kantor Kecamatan asalnya belum tersedia.
- g. Masih ada desa yang belum melaksanakan pendataan terkait penyusunan SDG's yang diperlukan guna pembangunan menyeluruh kedepannya;
- h. Prioritas pembangunan pada tahun mendatang adalah pemulihan ekonomi paska pandemi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah mengoptimalkan BUMDes. Akan tetapi dari 24 Desa di Kecamatan Klirong sampai saat ini baru 16 Desa yang sudah membuat BUMDes dan mendaftarkan ke Kementrian sehingga permasalahan tahun mendatang adalah membenbtuk BUMDes dan mengoptimalkan perannya dalam pembangunan ekonomi di desa

2. Dampak terhadap penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Klirong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. Dampak terhadap penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah. Dampak tersebut antara lain :

- a. Pelayanan Paten yang kurang lancar karena terkendala jaringan yang sering tidak terhubung dan stock blanko KTP yang sering kosong, serta banyaknya warga dari kecamatan sekitar yang ikut melakukan layanan administrasi di Kecamatan Klirong sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang.
- b. Masih banyak warga miskin atau yang membutuhkan bantuan belum terjangkau oleh bantuan apapun karena data kemiskinan yang belum valid. Untuk itu perlu dilakukan pembaruan yang terus menerus untuk data di DTKS sehingga perlu dilakukan pendampingan secara terus menerus.

- c. Masih ada desa yang belum tertib melakukan administrasi desa, sehingga menghambat desa yang lain untuk proses administrasinya.
- d. Masih belum menyeluruhnya pembangunan di desa, karena ada desa yang belum melakukan penyusunan SDG's yang diperlukan.
- e. Menurunnya capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah, karena terjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
- f. Pembinaan dan pendampingan terhadap BUMDes harus selalu dilakukan agar BUMDes bisa berjalan sesuai tugas pokoknya sebagai katalisator pemulihan ekonomi desa

3. Tantangan dan Peluang.

Mendasari permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Administrasi terkait dengan isu strategis pembangunan, tantangan dan peluang yang akan di hadapai dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan pelayanan yang bisa dilakukan oleh kecamatan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya baik SDM maupun fasilitas lainnya.
- b. Menjadikan desa-desa lebih siap menghadapi bencana, baik itu bencana alam maupun non alam.
- c. Membangun kawasan desa/ gabungan desa dengan yang mempunyai kesamaan permasalahan.
- d. Pengembangan BUMDes menjadi tantangan untuk semua desa. Hal yang paling pokok adalah melakukan inovasi-inovasi jenis usaha agar usaha di BUMDes tidak monoton dan mempunyai prospek agar BUMDes berkembang sehingga bisa menyerap tenaga kerja di desa-desa.

Sedangkan peluang yang bisa di dapatkan adalah:

- a. Kepemimpinan yang punya jangkauan ke depan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang partisipatif.
- b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berparkarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Kemudahan mengakses informasi yang cepat tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- d. Dana Desa bisa digunakan sebagai sumber akses modal bagi pendirian dan pengembangan BUMDes.
- e. Untuk penanganan bencana baik kalam maupun non-alam, Dana Desa supaya tetap dipersiapkan agar bisa tertangani secara benar.

4. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diperoleh beberapa isu strategis pada tahun 2025 yang dapat dipergunakan sebagai penentuan kebijakan penganggaran. Beberapa isu strategis Kecamatan Klirong tahun 2025 sebagai tugas dan fungsinya:

a. Monitoring dan Evaluasi Yang Belum Optimal

Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarekanakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian, masukan dari hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan perbaikan di OPD.

b. Berkaitan dengan DTKS, fungsi monitoring kepada desa-desa agar selalu melakukan validasi dan verifikasi data akan terus dilakukan. Diharapkan dengan validnya data kemiskinan, maka program-program penanggulangan masalah sosial akan lebih tepat sasaran.

c. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan harus bisa menjangkau baik pembangunan fisik maupun non fisik sehingga SDG's Desa bisa tercapai.

d. Dengan masih monoton-nya jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh sebagian besar BUMDes, penggalian-penggalian potensi desa untuk pengembangan BUMDes harus selalu dilakukan. Setelah itu, Dana Desa bisa digunakan sebagai sumber akses permodalan untuk mengembangkan BUMDes dalam menggali dan mengembangkan potensi desa dengan tujuan sebagai motor pemulihan ekonomi paska pandemi. Dan diharapkan tenaga-tenaga kerja desa yang ada bisa terserap oleh adanya aktivitas ekonomi BUMDes sehingga masalah-masalah sosial di desa berkurang.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2025 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan:

a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk rasionalisasi dan refocusing anggaran.

Beberapa program dan kegiatan berkurang anggaran sehingga perlu penyesuaian. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel 2.6;

b. Alokasi anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Klirong;

c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Klirong.

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan setiap tahun. Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang disusun sekarang ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Klirong dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Renja Tahun 2025
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Kecamatan Klirong											
No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	KECAMATAN KLIRONG				3.398.867.244					2.410.561.484	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.073.345.244	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.238.269.479	
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 Dok	7.500.000	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 Dok	7.500.000	
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.500.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.500.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	4 Laporan	3.000.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	4 Laporan	3.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	1.855.856.244	Kegiatan Administrasi Keuangan		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	2.024.702.030	
	Penyediaan Gaji dan	Kec.	Jumlah ASN yang		1.824.989.244	Penyediaan Gaji	Kec.	Jumlah ASN yang		1.997.555.000	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	
	Tunjangan ASN	Klirong	mendapatkan gaji dan tunjangan	15 orang		ASN	Klirong	mendapatkan gaji dan tunjangan	15 orang		
	Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Klirong	Jumlah bulan pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	30.867.000	Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Klirong	Jumlah bulan pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	27.147.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	57.764.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	53.542.449	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Klirong	Jumlah Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Paket	4.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Klirong	Jumlah Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Paket	3.595.310	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	24.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	23.200.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.000.000	
	Penyediaan bahan peraturan perundang-undangan	Kec. Klirong	Jumlah Jenis bahan bacaan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kec. Klirong	Jumlah Jenis bahan bacaan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	2.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	9.264.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	8.514.405	
	Rapat-rapat	Kec.	Jumlah OK yang	4 OK	5.000.000	Rapat-rapat	Kec.	Jumlah OK yang	6 OK	3.150.000	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	koordinasi dan konsultasi SKPD	Klirong	melakukan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Klirong	melakukan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Pengelolaan Arsip	12 Bulan	4.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Pengelolaan Arsip	12 Bulan	3.582.734	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 Unit	41.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 Unit	41.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	35.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	35.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	6.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	56.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	56.800.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.500.000	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30.300.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	54.725.000	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	54.725.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	14 Unit	32.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	14 Unit	32.000.000	
	Pemeliharaan mebel	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala Mebel	5 Unit	2.000.000	Pemeliharaan mebel	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala Mebel	5 Unit	2.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15 Unit	10.725.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15 Unit	10.725.000	
	Pemeliharaan/rehabet	Kec.	Jumlah Unit	3 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/re	Kec.	Jumlah Unit	3 Unit	10.000.000	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	
	litasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Klirong	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			habilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Klirong	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Klirong	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	88,00	1.196.522.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Klirong	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	88,00	65.800.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Klirong	Prosentase Pengajuan KTP, KK dan Perizinan Lainnya	100%	1.196.522.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Klirong	Prosentase Pengajuan KTP, KK dan Perizinan Lainnya	100%	65.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. Klirong	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	5 Jenis	60.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. Klirong	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	5 Jenis	60.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Klirong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Jenis	1.135.522.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Klirong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Jenis	5.000.000	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	10.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI	100%	10.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan		Jumlah Kegiatan dalam Rangka	2 Keg	10.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan		Terselenggaranya Penyelenggaraan	2 Keg	10.000.000	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	
	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kepala Daerah		Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan dalam Rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval dan Resepsi dalam Rangka HUT RI)	2 Kegiatan	10.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan dalam Rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval dan Resepsi dalam Rangka HUT RI)	2 Kegiatan	10.000.000	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan	38,08%	119.500.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan	38,08%	96.492.005	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	
	Desa		pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Rakor sinkronisasi Pembangunan			Pembangunan Desa		pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Rakor sinkronisasi Pembangunan			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6.000000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen, 24 Desa	28.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Jumlah Desa yang difasilitasi pembangunan partisipatifnya	2 Dokumen, 24 Desa	24.560.805	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dokumen, 144 Orang	42.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Klirong	Jumlah Pembinaan PKK, Jumlah Pembinaan Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan UKS, Jumlah warga penerima bantuan Perumahan	6 Dokumen, 144 Orang	29.533.500	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Mandiri			Desa		Mandiri			
	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Keg	119.500.000	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Klirong	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Keg	96.492.005	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Desa	25.000.000	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Desa	17.897.700	
	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dok	12.500.000	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang di Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Desa	12.500.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	6.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Desa yang di Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Desa	6.000.000	
	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan	24 Desa, 2 Dokumen	28.000.000	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan	24 Desa, 2 Dokumen	24.560.805	

No.	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes, Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Sembako	2, 2 Kegiatan	6.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes, Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Sembako	2, 2 Kegiatan	6.000.000	

Pada table 2.5 di atas ditunjukkan rancangan awal program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di Renja Kecamatan Klirong tahun 2025. Untuk seluruh kegiatan dan anggaran yang terdapat di rancangan Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 sesuai RKPD sudah dilakukan penyesuaian dengan Renstra tahun 2021-2026 dan sudah sesuai. Pada Anggaran tahun 2025 Kecamatan mempunyai pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 2.410.561.484,- untuk membiayai 4 Program 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Klirong diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) 2023, Musrenbangcam 2023 hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2024. Melalui forum musrenbang Kecamatan Klirong Tahun 2023 telah disepakati beberapa usulan masyarakat antara lain:

1. Usulan Desa

Setiap tahun dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat desa disepakati usulan-usulan pembangunan supra desa yang nantinya akan dimusyawarahkan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Setiap desa diperkenankan mengajukan 6 usulan yang selanjutnya dilakukan peng-input-an di aplikasi SIPD perencanaan untuk kemudian dibawa ke forum-forum OPD dan juga akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten.

Untuk usulan pembangunan tahun 2025 seluruh desa di Kecamatan Klirong yang berjumlah 24 desa mengusulkan 6 usulan sehingga terdapat 144 usulan supra desa yang diusulkan ke dinas terkait. Usulan Desa akan dilaksanakan di minggu keempat Bulan Agustus Tahun 2024.

2. Usulan Bantuan Keuangan Provinsi

Selain pengusulan pembangunan baik fisik maupun non-fisik melalui APBD Kabupaten, di Tahun 2025 desa maupun kecamatan diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan pembangunan yang nantinya akan dianggarkan melalui APBD Provinsi. Pengusulan tersebut dilakukan melalui aplikasi e-planning Jateng. Seluruh Desa dan Kecamatan Klirong diberikan akun untuk mengusulkan pembangunan wilayahnya melalui aplikasi tersebut. Usulan Bantuan Keuangan Provinsi akan dilaksanakan di minggu ke empat Bulan Agustus Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pemerintahan umum berdasarkan karakteristik kewilayahan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

A.1. Program Prioritas Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

A.2. Program Prioritas Provinsi, yaitu :

1. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
3. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting.
4. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla).
5. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi.
6. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.
7. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Kecamatan Klirong Tahun
2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	88,50

C. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalani misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

1. Faktor-Fakktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program dan kegiatan Kecamatan Klirong meliputi:

- a. Pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah.

Perumusan Program dan kegiatan Kecamatan Klirong diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan sesuai dengan fungsi atau urusan yang menjadi wewenangnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

- b. Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidak mampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan makan, sandang, papan atau perumahan dan Kesehatan. Indonesia dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia tentunya tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Untuk mengurangi jumlah masyarakat yang hidup miskin, Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program kemiskinan.

- c. Pelayanan PATEN yang berkualitas

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak terlepas dari norma, aturan, standart ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, Kecamatan Klirong telah menyusun Standar Operasional Prosedur maupun

Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Klirong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan hal tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatannya adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perijinan.

d. Pendampingan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBDes

Dalam rangka memfasilitasi desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, Kecamatan Klirong mengusung Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Klirong diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa, sehingga menimbulkan tertib administrasi desa.

e. Pendampingan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rangka menggali potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Program yang ada masih Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

- Jumlah Program. Jumlah kegiatan dan sub kegiatan
Jumlah Program dan jumlah kegiatan Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 yang di usulkan mencakup 4 (Program) program dan 9 (Sembilan Kegiatan) dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub kegiatan.

- Total kebutuhan Dana / Pagu Indikatif.

Total kebutuhan Dana / Pagu Indikatif perubahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar 2.410.561.484,, - (Dua Milyar Empat Ratus sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

3. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan di Kecamatan Klirong

Rumusan Program dan kegiatan renja 2025 sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, Pagu Indikatif perubahan maupun kombinasi keduanya. Program dan Kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Program dan kegiatan dalam Renja Kcamatan Klirong mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian keberhasilan pembangunan, kecamatan Klirong menetapkan program-program yang sesuai dengan fungsi penunjang urusan Administrasi Pemerintahan, tugas-tugas Camat dan fungsi Penunjang administrasi umum. Penetapan Program pembangunan urusan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan:

- a. Pelayanan yang terkait dengan non perijinan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

- a. Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa
- b. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- d. Fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum
- e. Fasilitasi Perencanaan pembangunan partisipatif
- f. Fasilitasi Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- g. Fasilitasi pendampingan penanggulangan kemiskinan.

4. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan dan evaluasi
 - Penyusunan Renstra dan renja
 - Penyusunan dokumen Pevaluasi perangkat daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Kecelakaan SKPD

- c. Bidang Administrasi Umum meliputi:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan bahan logistic kantor.
 - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan Bahan/Material.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD.
 - Penataan Arsip Dinamis SKPD.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor/ Bangunan Lainnya.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Mebel.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

8. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
9. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen disusun dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang di rencanakan. Tema yang diusung dalam dalam RKP 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap pertama pembanunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju visi Indonesia emas 2045.

Kecamatan Klirong mempunyai tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan H. Arif Sugiyanto, S.H selaku Bupati dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, MM selaku Wakil Bupati Kebumen.

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah: *"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"*. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 - 2026 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Klirong adalah : *"Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi"*

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2021 - 2026, maka Tujuan dari Kecamatan Klirong sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen adalah untuk mencapai misi *"Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi"*. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 disajikan pada tabel 3.1.

No	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset desa.
		3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
		3.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		3.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
		3.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		3.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		3.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa diwilayahnya
4	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	4	Kegiatan Perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah
		4.1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah
		4.2	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
		5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		5.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		5.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		6	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah
		6.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		6.2	Penyediaan bahan logistik kantor
		6.3	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

No	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		6.4	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		6.5	Penyediaan bahan/material
		6.6	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6.7	Penatausahaan arsip dinamis SKPD
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
		7.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		7.3	Penyediaan jasa surat menyurat
		8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		8.2	Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor dan Bangunan Lainnya
		9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional; atau Lapangan
		9.2	Pemeliharaan Mebel
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		9.4	Pemerliharan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya

Terdapat 4 (Empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2025. Program pertama adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp.

65.800.000,-, Program kedua Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-, Program ketiga Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.492.005,- dan yang terakhir Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 2.238.269.479,- sehingga total Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp 2.410.561.484,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun rincian kerangka pendanaan dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Perencanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2025.

Kebumen, 26 Juni 2025

Camat Klorong



Eko Purwanto, S.STP., M.Si
Pembina Tk.1

51 NIP. 197901161998101001

19/01/2027	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão de Recursos Humanos	Programa de Gestão
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

[illegible]

